

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Asy'ari, Hasyim. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Tanthowi, Pramono U., Aditya Perdana, dan Mada Sukmajati (eds.). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Asy'ari, Hasyim. "Menata Pembentukan Regulasi Pemilihan Umum: Tinjauan dan Prospek." *Hukum Tata Negara: Penataan Regulasi Pemilu dan Pilkada*. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar HTN/HAN, Balikpapan, 2024.
- Asy'ari, Hasyim. "Tata Kelola Pemilu 2024 di Indonesia: Tinjauan dan Prospektif." *Governance Issues in Constitutional and Administrative Law: Konferensi Internasional FH UKSW*. Salatiga, 2024.
- Budhiati, Ida, Rian Adhivira Prabowo, dan Edho Rizky Ermansyah. "Norma Tanpa Sanksi: Polemik 'Kuota Gender' dalam Undang-Undang dan

- Implikasinya terhadap KPU sebagai *Self-Regulatory Body*.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Farida, Ulfa Jamilatul. “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc untuk Pemilu Serentak 2024.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2, 2023.
- Mozaffar, Shaheen dan Andreas Schedler. “The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction.” *International Political Science Review*, Vol. 23, No. 1, 2002.
- Muhlisin, Luqman Hakim, dan Rian Adhivira Prabowo. “Pertautan yang Legal dan yang Etis: Pemaknaan Regulasi KPU dan Bawaslu dalam Putusan DKPP.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Muni, Abd dan Abd. Munib. “Anomali Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu di Tengah Dominasi Elit Lokal (Studi Etnografi di Madura).” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Sandrawati, Nyoman Amie. “Antisipasi Cybercrime dan Kesenjangan Digital dalam Penerapan TIK di KPU.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Sumodiningrat, Aprilian. “Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2, 2023.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Jayus, dan A’an Efendi. “Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021.
- Tosika, Metrina. “Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon pada Pilkada Serentak Tahun 2024.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Virdaus, Saivol, Siciliya Mardian Yoel, dan Wimpy Ardhy Prasetya. “Pola Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2024: Strategi Permohonan dan Upaya Pencegahan.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2025.

Wicaksono, Dian Agung dan Garuda Era Ruhpinesthi. "Inisiasi Penerapan Purcell Principle oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 1, 2025.

Zulfikhar. "Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Skripsi

Paradheta, Duan Sofyan. *Implikasi Hukum Model Keserentakan Pemilihan Umum Nasional dan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 259/PUU-XXIV/2026.